

Analisis laporan realisasi anggaran belanja pada dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Berau

Carillya Suwandari^{1✉}, Hamid Bone², Wulan Iyhg Ratna Sari³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi belanja dengan menggunakan tingkat varians belanja, efisiensi belanja, tingkat pertumbuhan belanja, dan keserasian belanja pada realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau pada tahun 2016-2018. Dari hasil penelitian analisis varians belanja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau pada tahun 2016 sebesar 88,10%, pada tahun 2017 sebesar 85,18% dan pada tahun 2018 sebesar 80,28%. Rasio efisiensi belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau selama tahun 2016-2018 kurang dari 100%, sehingga masuk dalam predikat kriteria penilaian cukup efisien. Analisis pertumbuhan belanja, kinerja anggaran belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dari Tahun Anggaran 2016-2018 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. Sedangkan analisis keserasian belanja untuk rasio belanja operasi terhadap total belanja selama tahun 2016-2018 proporsinya melebihi 90% dapat dikatakan tidak seimbang karena berada dibawah 5%, sedangkan untuk tahun 2018 dikatakan seimbang karena berada dikisaran 5-20%.

Kata kunci: Analisis varians belanja; rasio efisiensi belanja; analisis pertumbuhan belanja; analisis keserasian belanja

Analysis of the budget realization report at the Berau district office of population control family planning for women's empowerment and child protection

Abstract

The purpose of this study is to determine the realization of spending using the level of expenditure variance, expenditure efficiency, the level of expenditure growth, and the harmony of spending in the realization of the budget at the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Berau District in 2016-2018. From the result of the analysis expenditure variance Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Berau District in 2016 amounted to 88,10%, in 2017 amounted to 85,18% and in 2018 amounted to 80,28%. The expenditure efficiency ratio of the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Berau District during 2016-2018 is less than 100%, so it is included in the criteria rating quite efficiently. Analysis of expenditure growth, budget performance at the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Berau District from the 2016-2018 fiscal year showed good performance due to savings in the use of budget realization. While the analysis of expenditure harmony for the ratio of operating expenditure to total expenditure during 2016-2018 the proportion exceeds 90% can be said to be unbalanced because it is under 5%, whereas for 2018 said to be balanced because it is in the range of 5-20%.

Key words: *Expenditure variance analysis; expenditure efficiency ratio; expenditure growth analysis; harmony expenditure analysis*

Copyright © 2022 Carillya Suwandari, Hamid Bone, Wulan Iyhg Ratna Sari

✉ Corresponding Author

Email Address: csuwandari@yahoo.com

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan segenap hak dan kewajiban pemda yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan daerah. Termasuk didalamnya susunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau dapat juga diartikan seluruh aset baik berupa harta benda uang terkait hak dan kewajiban daerah. APBD digunakan sebagai instrumen peningkatan layanan umum dan alat pendukung tercapainya otonomi daerah untuk tatanan kehidupan rakyat yang sejahtera.. Munandar (2011) mendefinisikan, anggaran (budget) sebagai perencanaan terstruktur dari segenap aktivitas organisasi secara kesatuan finansial yang berlaku pada periode tertentu di masa depan. Aktivitas pembangunan daerah mengalokasikan dana dari APBD berdasarkan banyaknya pembelanjaan yang dilaksanakan.

Data informasi terkait realisasi dan anggaran dikumpulkan dalam dokumen yang disebut laporan realisasi keuangan daerah. Laporan realisasi dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dedi Nordiawan (2010:122) Laporan realisasi anggaran ialah dokumen yang berisi sajian ringkasan basis, pengalokasian dana dan penggunaan sumber daya ekonomi dari pengelolaan oleh pemda dalam satu waktu pelaporan. Peneliti menyimpulkan bahwa laporan realisasi ialah bagian dari pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berisi sajian data info terkait realisasi dan anggaran entitas laporan. Data yang diperoleh dari laporan diperiksa dengan membandingkan antara anggaran yang dibutuhkan dengan realisasi yang dilakukan. Hasil data berupa perbandingan merupakan tingkat capaian target sesuai kesepakatan dan disesuaikan dengan peraturan/ UU.

Tabel 1.

Total Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Outcome/Output Kegiatan
2018	14.102.382.000	11.358.707.366	-Belanja Operasi -Belanja Modal
2017	10.617.877.000	9.055.084.843	-Belanja Operasi -Belanja Modal
2016	16.641.023.700	14.661.147.498	-Belanja Operasi -Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 1. bahwa total anggaran realisasi belanja Dinas P3A Kabupaten Berau dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016, anggaran belanja sebesar Rp16.641.023.700 dengan realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp14.661.147.498 dan selisih anggaran sebesar Rp1.979.876.202 atau 88,10% dari anggaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp10.617.877.000 dengan realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp9.055.084.843 dan selisih anggaran lebih sebesar Rp1.562.792.157 atau 85,28% dari anggaran belanja yang ditetapkan, serta tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp14.102.382.000 dengan realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp11.358.707.366 dan terjadi selisih anggaran lebih sebesar Rp2.743.674634 atau 80,54% dari anggaran belanja yang ditetapkan.

Dari data tiga tahun terakhir, anggaran belanja mengalami fluktuasi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap capaian output/outcome pada Dinas P3A Kabupaten Berau. Kondisi anggaran belanja yang naik turun (fluktuasi) setiap tahun ini menarik untuk diteliti lebih jauh. Kondisi capaian output/outcome setiap tahun apakah berkaitan dengan besaran anggaran belanja atau tidak. Jika anggaran belanja dalam tiga tahun terakhir berimbang pada capaian output/outcome maka anggaran belanja menjadi alat yang sensitif terhadap perubahan anggaran belanja dan capaian atau sebaliknya. Kondisi serapan anggaran belanja yang belum mencapai 100% bisa jadi juga ikut mempengaruhi penurunan anggaran belanja. Capaian output/outcome yang masih dibawah target juga bisa menjadi dasar anggaran belanja naik turun (fluktuatif). Untuk mengetahui apa yang terjadi pada anggaran belanja DP3A Kabupaten Berau maka penelitian ini perlu dilakukan.

METODE

Definisi Operasional

Dimaksudkan sebagai pernyataan terkasit penggunaan indikator pada riset ini, maka secara operasional dapat diuraikan dengan berikut ini:

Laporan Realisasi Anggaran ialah sumber data didalamnya berisi penyajian laporan sumber, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya ekonomi dimana pengelolanya yakni lembaga pemerintahan pada setiap sekali periode pelaporan;

Realisasi Belanja adalah pelaksanaan anggaran belanja yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya itu, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Dinas P3A Kabupaten Berau, baik penyimpangan yang menguntungkan maupun yang merugikan;

Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai pengeluaran Dinas P3A Kabupaten Berau dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya;

Yang termasuk dalam belanja satuan kerja perangkat daerah menurut Dinas P3A Kabupaten Berau antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal;

Belanja Operasi adalah belanja daerah yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung pada Dinas P3A Kabupaten Berau;

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten Berau memiliki maksud membentuk modal dengan penambahan aset tetap/inventaris bermanfaat jangka panjang. Berikut pengeluaran bagi biaya pemeliharaan untuk meningkatkan masa pemakaian jangka panjang dan peningkatan kapasitas dan kualitas aset;

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang/jasa/barang pemberian Dinas P3A Kabupaten Berau untuk karyawan ASN non PNS dengan ikatan kerja didalam negeri dan diluar negeri yang merupakan bentuk fee dari penyelesaian tugasnya. Pemberian kompensasi tidak termasuk pekerjaan yang berhubungan terkait pembentukan modal dan/atau aktivitas dengan output kategori belanja barang; dan

Efisiensi Belanja Dinas P3A Kabupaten Berau adalah penghematan anggaran belanja yang dilakukan oleh Dinas P3A Kabupaten Berau.

Kriteria Efisien pengukuran anggaran belanja daerah yang dipergunakan oleh Dinas P3A Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Kriteria Efisien pengukuran anggaran belanja daerah

Kategori	Predikat
Tidak Efisien	> 100 %
Kurang Efisien	100 %
Cukup Efisien	90 % - 99 %
Efisien	75 % - 89 %
Sangat Efisien	< 75 %

Alat Analisis

Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja digunakan untuk menganalisa perbedaan atau selisih antara realisasi anggaran belanja tahun 2016 sampai 2018 dari dengan anggaran yang diterima oleh Dinas P3A Kabupaten Berau. Indikator yang digunakan yakni:

Perhitungan menggunakan perumusan berikut:

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Rincian Data Yang Diperlukan

Populasi Sebagai bentuk memudahkan riset yang dilakukan maka keperluan sumber data pendukungnya adalah berikut ini:

Gambaran umum Dinas P3A Kabupaten Berau.

Laporan realisasi anggaran belanja Dinas P3A Kabupaten Berau tahun 2016 s/d 2018.

Pemilihan Objek Penelitian

Riset dilaksanakan di Dinas P3A Kabupaten Berau dengan alamat di Jln. A. Pranoto Tanjung Redeb, Berau. Penelitian ini difokuskan pada anggaran lain realisasi belanja Dinas P3A Kabupaten Berau periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018.

Metode Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data pada riset ini ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilaksanakan dengan melakukan pendokumentasian terkait laporan realisasi anggaran belanja

tahun 2016 sampai 2018 dan dokumen lainnya pada Dinas P3A Kabupaten Berau yang terkait dengan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Varians Belanja

Peneliti telah melakukan analisis varians belanja digunakan untuk perbedaan atau selisih antara realisasi anggaran belanja tahun 2016 s/d 2018 dari dengan anggaran yang diterima oleh Dinas P3A Kabupaten Berau sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan analisis varians anggaran belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.

Hasil perhitungan analisis varians anggaran belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Output/Outcome	Persentase (%)
2016	16.606.023.700	14.630.397.498	1.975.626.202	88,10
2017	10.582.877.000	9.015.334.843	1.567.542.157	85,18
2018	14.040.882.000	11.272.457.366	2.768.424.634	80,28

Tahun anggaran 2016 menunjukkan anggaran sebesar Rp 16.606.023.700 dan realisasi belanja sebesar Rp 14.630.397.498 atau 88,10% sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 1.975.626.202 atau 11,9% yang tidak terealisasi dari total APBD. Tahun anggaran 2017 menunjukkan anggaran sebesar Rp 10.582.877.000 dan realisasi belanja sebesar Rp 9.015.334.843 atau 85,18% menimbulkan selisih sebesar Rp 1.567.542.157 atau 14,82% yang tidak terealisasi dari total APBD. Tahun anggaran 2018 memiliki anggaran sebesar Rp 14.040.882.000 dan realisasi belanja adalah sebesar Rp 11.272.457.366 atau 80,28% menimbulkan selisih sebesar Rp 2.768.424.634 atau 19,72% yang tidak terealisasi dari total APBD.

Hasil Penelitian Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja Dinas P3A Kabupaten Berau. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Dinas P3A Kabupaten Berau.

Hasil perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.

Hasil perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
2016	14.630.397.498	16.606.023.700	88,10	Cukup Efisien
2017	9.015.334.843	10.582.877.000	85,18	Cukup Efisien
2018	11.272.457.366	14.040.882.000	80,28	Cukup Efisien

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Dinas P3A Kabupaten Berau. Dengan rasio efisiensi kurang dari 100% maka Dinas P3A Kabupaten Berau telah melakukan efisiensi anggaran. Namun ketika melebihi 100% terdapat indikasi timbulnya pemborosan anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar 88,10%, pada tahun 2017 sebesar 85,18%, pada tahun 2018 sebesar 80,28%. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2018 efisiensi anggaran kurang dari 100% yang berarti bahwa Dinas P3A Kabupaten Berau telah mengefisiensi anggaran dengan predikat kriteria penilaian cukup efisien (Mahsun, 2014).

Hasil Penelitian Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja Dinas P3A Kabupaten Berau berguna sebagai analisa perkembangan pada periode waktu jangka panjang mengarah ke hasil positif atau negatif. Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja tahun 2015 s/d 2016 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.

Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja tahun 2015 s/d 2016 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Uraian	Realisasi (Rp) 2015	Realisasi (Rp) 2016	Pertumbuhan Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	16.066.991.695	14.224.128.498	(1.842.863.197)	(11,46)
Belanja Pegawai	4.349.076.006	5.901.200.311	1.552.124.305	35,68
Belanja Barang Dan Jasa	11.717.915.689	8.322.928.187	(3.394.987.502)	(28,97)
Belanja Modal	552.872.750	437.019.000	(115.853.750)	(20,95)
Belanja Peralatan & Mesin	552.872.750	437.019.000	(115.853.750)	(20,95)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara terperinci bahwa realisasi belanja operasi tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 1.842.863.197 atau 11,46% terhadap realisasi belanja operasi tahun 2015 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, hanya belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.552.124.305 atau 35,08% sedangkan belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp 3.394.987.502 atau 28,97%. Dan belanja modal tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar Rp 115.853.750 atau 20,95% terhadap realisasi anggaran tahun 2015 yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin.

Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja tahun 2016 s/d 2017 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.

Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja tahun 2016 s/d 2017 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Uraian	Realisasi (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2017	Pertumbuhan Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	14.224.128.498	8.749.184.843	(5.474.943.655)	(38,49)
Belanja Pegawai	5.901.200.311	5.943.476.540	42.276.229	0,71
Belanja Barang Dan Jasa	8.322.928.187	2.805.708.303	(5.517.219.884)	(66,28)
Belanja Modal	437.019.000	305.900.000	(131.119.000)	(30)
Belanja Peralatan & Mesin	437.019.000	305.900.000	(131.119.000)	(30)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan secara terperinci bahwa realisasi belanja operasi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 5.474.943.655 atau 38,49% terhadap realisasi belanja operasi tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 42.276.229 atau 0,71%, belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp 5.517.219.884 atau 66,28%. Dan belanja modal tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 131.119.000 atau 30% terhadap realisasi anggaran tahun 2016 yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin.

Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja tahun 2017 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.

Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja tahun 2017 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Uraian	Realisasi (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2018	Pertumbuhan Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	8.749.184.843	10.582.679.366	1.842.863.197	21,06
Belanja Pegawai	5.943.476.540	4.852.665.644	(1.552.124.305)	(26,11)
Belanja Barang Dan Jasa	2.805.708.303	5.636.359.722	3.394.987.502	121
Belanja Hibah	0	93.654.000	93.654.000	100
Belanja Modal	305.900.000	776.028.000	115.853.750	37,87
Belanja Peralatan & Mesin	305.900.000	215.690.000	(115.853.750)	(37,87)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	560.338.000	560.338.000	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja operasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.842.863.197 atau 21,06% terhadap realisasi belanja operasi tahun 2017 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 1.552.124.305 atau 26,11%, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp 3.394.987.502 atau 121% sedangkan belanja hibah terrealisasi pada tahun 2018 Rp 93.654.000 dan tidak di anggarkan pada tahun 2017. Dan belanja modal tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 115. 853. 750 atau

37,87% terhadap realisasi anggaran tahun 2017 yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan belanja modal gedung & bangunan.

Hasil Penelitian Analisis Keserasian Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8.

Hasil perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
2016	14.224.128.498	14.630.397.498	0,97
2017	8.749.184.843	9.015.334.843	0,97
2018	10.582.679.366	11.272.457.366	0,93

Pada tabel diatas rasio belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2016 adalah sebesar 0,97 artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi adalah sebesar 0,97 atau 97%, pada tahun 2017 adalah sebesar 0,97 artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi adalah sebesar 0,97 atau 97%, sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,93 artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi adalah sebesar 0,93 atau 93%. Pada tabel tersebut rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2016 adalah sebesar 0,029 artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal adalah sebesar 0,029 atau 2,9%, pada tahun 2017 adalah sebesar 0,033 artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal adalah sebesar 0,033 atau 3,3%, sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,068 artinya porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal adalah sebesar 0,068 atau 6,8%.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9.

Hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja tahun 2016 s/d 2018 oleh Dinas P3A Kabupaten Berau

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2016	437.019.000	14.630.397.498	0,029
2017	305.900.000	9.015.334.843	0,033
2018	776.028.000	11.272.457.366	0,068

Kriteria penilaian belanja operasi terhadap total belanja dan belanja modal terhadap total belanja menurut Mahmudi (2016:162), berdasarkan tabel diatas proporsi belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2016 sampai dengan 2018 proporsinya melebihi 90%, dapat dikatakan belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak seimbang. Kemudian pada tabel tersebut proporsi belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2016 dan 2017 di bawah 5% yang berarti belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2016 dan 2017 tidak seimbang. Sedangkan pada tahun 2018 berada di kisaran 5-20% yaitu, sebesar 6,8%, yang berarti proporsi belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2018 dapat dikatakan seimbang.

SIMPULAN

Berdasarkan Peneliti telah melakukan riset yang berjudul "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau" dan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari analisis varians belanja dapat diketahui bahwa kinerja anggaran belanja Dinas P3A Kabupaten Berau dari tahun anggaran 2016 s/d 2018 menunjukkan kinerja yang dinilai baik dengan alasan realisasi belanja lebih kecil dari pengeluaran anggaran belanja;

Rasio efisiensi belanja Dinas P3A Kabupaten Berau selama tahun 2016-2018 nilai persentasinya berada dikisaran 80%-90% dan dinyatakan cukup efisien;

Analisis pertumbuhan belanja pada setiap tahun 2016-2018 belanja operasi dan belanja modal mengalami fluktuasi dan penyebabnya adalah tidak konsistennya jumlah anggaran dan realisasi; dan Analisis keserasian belanja dapat dijelaskan untuk belanja operasi terhadap total belanja tahun 2016-2018 dengan nilai presentasinya melebihi 90% yang berarti dapat dikatakan tidak seimbang, sedangkan untuk belanja modal terhadap total belanja, untuk tahun 2016-2017 nilai presentasinya dibawah 5%, lebih rendah dari proporsi yang ditentukan maka dikatakan tidak seimbang. Sedangkan untuk 2018 memiliki nilai presentasinya melebihi 5% yaitu 6,8%, maka dikatakan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
- Munandar, M. 2011. Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja. BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.